

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. 2 Jakarta: PT Toko Gunung Agung Asikin.
- Ammirudin Zainal. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyono, Imam Ardi. 2005. Pentingnya Insolvency Test Dalam Permohonan Kepailitan. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002. Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: menurut UU No. 37 tahun 2004 dan UU No. 4 tahun 1998 (suatu perbandingan). Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2015. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Jakarta: Kencana.

Jurnal ilmiah:

- Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015
- Ni Nyoman Juliantini*, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiat, Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Elviana Sagala, Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 03. No. 01. Maret 2015
- Sutrisno, Mukidi, Mustamam Analisis penolakan rencana perdamaian oleh kreditor konkuren dalam proses penundaan kewajiban Pembayaran utang, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 2, Juni 2022
- Arijna Nurin Sofia, Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Jurist-Diction Vol. 3 (4) 2020

Perundang-Undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran
HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBG(Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen)

Putusan Pengadilan:

Nomor : 186/Pdt.Sus.Pkpu/2022/Pn.Niaga.Jkt. Pst.

Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Nomor : 3/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Smg

Nomor : 264/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Nomor : 71/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst